LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2020

DINSOSP2KBP3A KOTA CIMAHI

PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2020.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa laporan akuntabilitas kinerja ini belum memberikan gambaran keberhasilan program secara menyeluruh di semua sub bidang, namun hanya pada sub bidang yang menjadi skala prioritas. Namun demikian, intisari dari laporan kinerja ini mutlak menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi setiap perangkat daerah, para pihak yang membutuhkan dan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program serta untuk mewujudkan upaya penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dimasa mendatang.

Kepada berbagai pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2020 ini dengan sungguh – sungguh, sesuai tugas dan fungsinya di bidang urusan sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya.

Mudah – mudahan dengan integritas yang kita miliki dalam menjaga eksistensi akuntabilitas DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi ini, akan tetap menjadi elemen positif reformasi birokrasi untuk mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Cimahi yang lebih baik.

Semoga Allah senantiasa memberikan Hidayah dan Inayah - Nya bagi kita semua, agar kita tetap memiliki kekuatan, kemudahan dan keselamatan dalam menjalankan tugas dengan baik dan profesional.

Cimahi, Pebruari 2020

KEPALA DINSOSP2KBP3A KOTA CIMAHI,

Drs. Guntur Priyambada
Pembina Tk I
NIP. 19660329 199201 1 003

Dipindai dengan CamScanner

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi (DINSOSP2KBP3A) merupakan Laporan capaian Akuntabilitas Kinerja pada tahun ketiga dalam masa Renstra DINSOSP3KBP3A tahun 2017 – 2022. LKIP tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja 2020 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis tahun 2017-2022 dan mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang telah disepakati antar Kepala DINSOSP2KBP3A dengan Walikota Cimahi.

Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi ditunjang dengan 7 (tujuh) program dan 33 Kegiatan dengan 4 (empat) Tujuan, 4 (empat) sasaran strategis, 4 (empat) indikator Kinerja Utama dan 21 (dua puluhh satu) Indikator Kinerja Program.

Berkaitan dengan hal itu, maka berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 20 indikator program, dapat diinformasikan ketercapaian kinerja indikator sasaran sebagai berikut : 9 indikator kinerja program berhasil mencapai target kinerja 100 %, 5 indikator kinerja program berhasil melampaui target yang ditetapkan yakni persentase SDM Kesos yang tersertifikasi, persentase PMKS yang memeperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, persentase PMKS yang direhabilitasi, persentase LKS yang terakreditasi dan rasio akseptor. Sedangkan indikator program yang belum mencapai target kinerja sebanyak 6 indikator yakni terdiri dari capaian penyerapan anggaran, persentase tingkat keberlangsungan kontrasepsi, persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG, Persentaase anak yang terlayanni kebutuhan dasar, sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga, dan persentase perempuan sebagai manager, profesional, administrasi, teknisi

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2020 dianggarkan biaya sebesar Rp. 7.595.956.100,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 6.307.828.430,- atau sebesar 83,04% dan realisasi fisik sebesar 97,59 % jadi seluruh kegiatan fisik telah dilaksanakan namun terdapat efesiensi sebesar 16,96%.

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 UMUM 1

1.2 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 2

1.2.1 Uraian Tugas 3

BAB II 5

PERENCANAAN KINERJA 5

2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA 5

2.1.1 Hasil Evaluasi Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) 6

2.2 PERJANJIAN KINERJA 7

BAB III 10

AKUNTABILITAS KINERJA 10

3.1 AKUNTABILITAS KINERJA 10

3.1.1 CAPAIAN KINERJA 10

1. Capaian Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 10
2. Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja 2018 Dan 2019 12
3. Realisasi Tahun 2019 Dengan Target RPJMD 21
4. Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan 22
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya 24
6. Cross Cutting Program Dengan SKPD Terkait Dan Instansi Lainnya 26
7. Prestasi, Penghargaan Dan Inovasi Kota Cimahi Tahun 2019 30
8. Prestasi, Penghargaan dan Inovasi Kota Cimahi Tahun 2018 30

BAB IV 31

PENUTUP 31

4.1 Penutup 31

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 UMUM

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Peremapuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi telah melakukan perencanaan program dan kegiatan di awal tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Dinas kemudian mengimplementasikannya guna dicapainya kemajuan-kemajuan dalam penanganan masalah pembangunan Kota Cimahi, khususnya bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di akhir tahun, dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan *good and clean government*, maka Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020.

Pada tahun 2020 dunia dilanda bencana non alam dengan mewabahnya virus covid 19 atau corona virus. Bencana ini telah membawa dampak bagi dunia umumnya dan bagi Negara Indonesia khususnya terhadap berbagai sendi kehidupan. Tidak saja laju pertumbuhan ekonomi yang terkendala akan tetapi berpengaruh juga terhadap berbagai hal. Rencana Kerja Tahunan yang telah tersusun dalam dokumen perencanaanpun tentu saja berubah karena mengalami refocusing anggaran untuk penanganan wabah tersebut, dampak ini juga dirasakan dalam pengimplementasian rencana kerja yang sudah ditetapkan. Hampir 50 % anggaran terfokus untuk penanganan dampak covid.

Maksud Penyusunan LKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi Tahun 2020 yang selanjutnya disingkat menjadi DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi ini adalah sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi yang sudah ditetapkan di awal tahun 2020, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi tahun 2020 dan diimplementasikan selama tahun 2020. Sedangkan tujuan dalam Penyusunan LKIP DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi ini adalah memberikan gambaran tentang pencapaian target dan sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2020.

Dipindai dengan CamScanner

1.2 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, dan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi. Sesuai dengan Peraturan Wali kota Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dipindai dengan CamScanner

Struktur organisasi perangkat daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

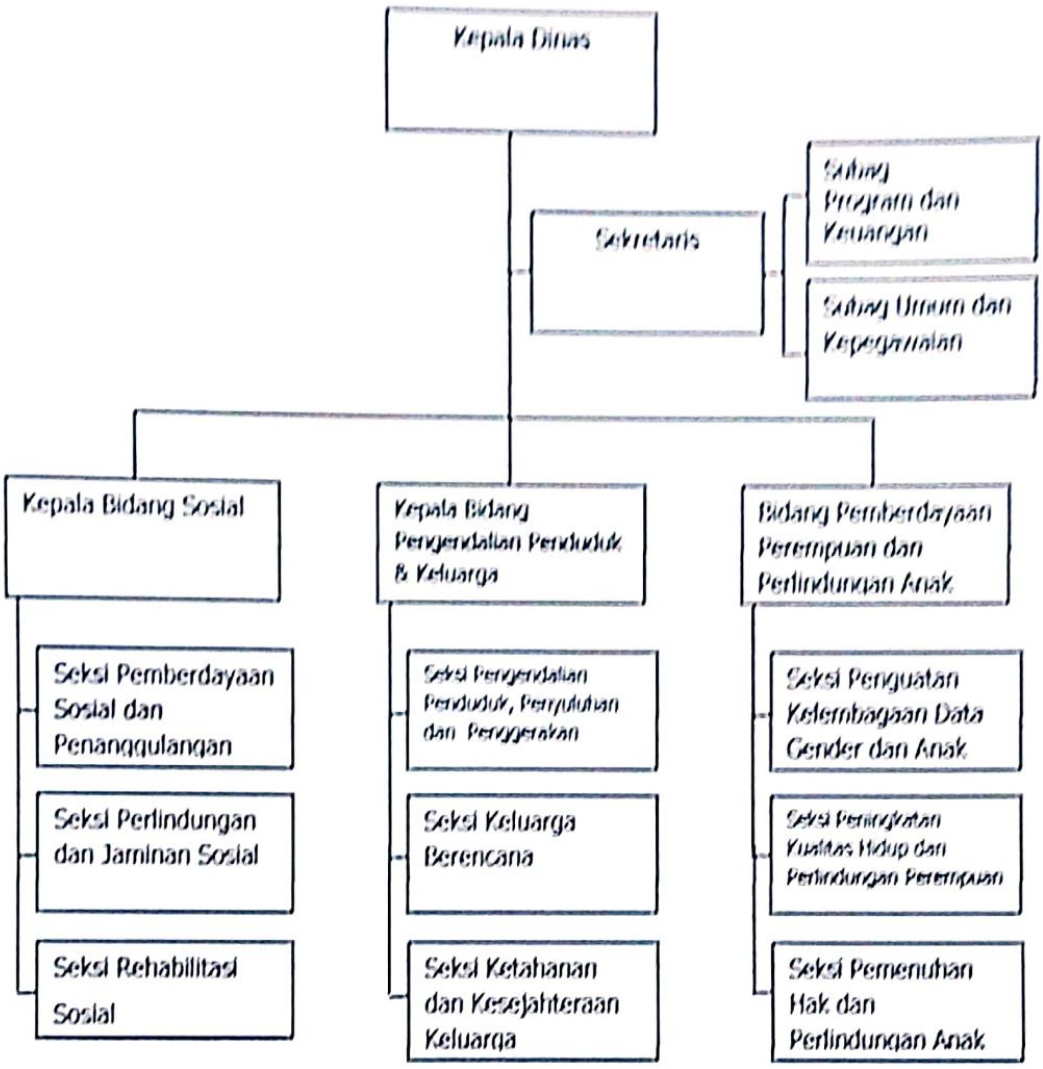

1.2.1 Uraian Tugas

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait Bidang Sosial:
   1) Kelompok Usaha Bersama yang telah dibentuk masih membutuhkan penguatan dan harus dimonitoring perkembangan dan keberlanjutannya
   2) Masih ada Rumah Tangga Sangat Miskin yang tidak memiliki akses pendidikan dan kesehatan
   3) Potensi PSKS yang cukup besar masih harus dioptimalkan pendayagunaannya
   4) Manajemen panti sosial/LKSA masih kurang optimal, LKSA di Kota cimahi blm

Dipindai dengan CamScanner

punya pekerja sosial.

5) Kemampuan penyandang cacat dalam memperbaiki kualitas hidup belum optimal, dan hrs diberi akses terbatsa
6) Data PBI dan PMKS harus senantiasa divalidasi keakuratannya
7) Penanganan PMKS dan masalah strategis menyangkut tanggap cepat darurat harus selalu tersedia
8) Masih terdapat anak jalanan yang harus segara dicarikan solusi penanganannya
9) Masih kurangnya sarana prasarana untuk penanganaan PMKS misalnya untuk rumah singgah yang memadai

b. Permasalahan terkait Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :
   1) KB MKJP harus lebih digalakkan
   2) PIK Remaja yang sudah terbentuk harus tetap dibina pemahaman, sikap & perilakunya tentang kesehatan & hak-hak reproduksi
   3) Banyaknya program dan kegiatan dari Pusat (seperti Lomba lomba) yang memerlukan Biaya yang cukup tinggi dalam seremonialnya, akibatnya berkurang sumber daya baik SDM maupun anggaran untuk menggarap pemberdayaan dan peningkatan kualitas keluarga.

c. Permasalahan terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
   1) Pembangunan yang responsif gender masih belum optimal
   2) Tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan sudah cukup baik, hanya tetap harus ditingkatkan kualitasnya
   3) Masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
   4) Belum terbentuknya UPTD P2TP2A sebagaimana diamanatkan oleh Permen PPPA nomor 4 tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsi P2TP2A kepada masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyususn Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM). RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya, RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD dan RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah. RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2018, selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota juga harus menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengacu pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025.

Untuk mencapai visi RPJPD tersebut ditetapkan 5 (lima) misi jangka panjang Kota Cimahi, yaitu :

1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah;
4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan;
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Kurun waktu tahun 2017 – 2022 merupakan pembangunan tahap keempat dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025, yang mana dalam kurun waktu tersebut seluruh upaya pembangunan diarahkan pada *pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar.* Oleh karena itu visi dan misi RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 pun mengacu pada hal tersebut.

Dipindai dengan CamScanner

Dengan telah ditetapkannya RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi dalam SK Kepala DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Nomor : 800/073/DINSOSP2KBP3A/2018 sebagai berikut :

Tabel. 2.1

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4
MISI III : MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN DAERAH BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN SEKTOR JASA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI KECIL MENENGAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN			
1	Mengentaskan permasalahan PMKS	Meningkatnya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Persentase penanganan PMKS
MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKEPRIBADIAN, BERAKHLAK MULIA, CERDAS, SEHAT DAN UNGGUL			
2	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Total Fertility Rate (TFR)
MISI V : PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN BERKELANJUTAN			
3	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender
			Indeks Pemberdayaan Gender
MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKEPRIBADIAN, BERAKHLAK MULIA, CERDAS, SEHAT DAN UNGGULT			
4	Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak	ingkat capaian Kota Layak Anak

2.1.1 Hasil Evaluasi Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Cimahi pada awal tahun 2020 merupakan indikator kinerja yang mengacu pada RPJMD 2017-2022 yang telah ditetapkan, Sehingga pada anggaran perubahan tahun 2020 perjanjian kinerja disesuaikan dengan RPJMD yang baru sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih.

Berdasarkan keputusan walikot Cimahi nomor : 060/Kep.1449-Org/2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2022 telah dilakukan perubahan IKU DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi ,

Dipindai dengan CamScanner

Perubahan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh pemerintah Kota Cimahi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja , menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kota Cimahi.

Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi telah ditetapkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 2.2
Indikator Kinerja Utama Pemerintah DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Penetapan Rpjmd 2012-2017 Dan IKU Berdasarkan Keputusan Wali Kota No. 060/Kep.1449-Org/2019

	IKU HASIL PENETAPAN RPJMD 2017-2022				IKU BERDASARKAN KEPWAL NO. 060/KEP.1449-Org/2019		
NO.	SASARAN STRATEGIS	NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NO.	SASARAN STRATEGIS	NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	1	2	1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial	1	Persentase Penanganan PMKS	1	Meningkatnya taraf Kesejahteraan, Kualitas dan kelangsungan hidup PMKS	1	Cakupan PMKS yang mendapat bantuan sosial
2	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang	2	Total Fertility Rate (TFR)	2	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang terkendali	2	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)
3	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan	3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	3	Meningkatnya Kualitas Hidup Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	3	Tingkat Capaian Kota layak anak
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	4	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	4	Tingkat Indikator Penilaian Anugrah Parahita ekapraya (APE) yang diperoleh
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak-hak Anak	4	Tingkat capaian Kota Layak Anak				

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran beserta indikator programnya. Pada tahun 2019 target-target setiap indikator sasaran telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 1.3
Perjanjian Kinerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2020

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Terfasilitasinya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarpras yang disediakan dan dipelihara	100 %
Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi	Persentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	100 %
Terfasilitasinya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarpras yang disediakan dan dipelihara	100 %
Meningkatnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase aparatur yang dibina	100 %
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian Nilai LAKIP	B
	Capaian Penyerapan Anggaran	87,50%
Meningkatnya penanganan pemberdayaan PMKS	Persentase PMKS yang diberdayakan	7,10%
Meningkatnya jumlah SDM Kesos yang tersertifikasi	Persentase SDM Kesos yang tersertifikasi	14,67%
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	2,08%
Meningkatnya penanganan PMKS yang direhabilitasi	Persentase PMKS yang direhabilitasi	6,42 %
Meningkatnya LKS yang terakreditasi	Persentase LKS yang terakreditasi	44,00%
Meningkatnya rasio akseptor KB	Rasio akseptor	78,70%
Meningkatnya keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persentase tingkat keberlangsungan kontrasepsi	27 %
Meningkatnya usia kawin pertama	Rata-rata usia kawin pertama	21,5 tahun
Meningkatnya kemandirian akseptor KB	Rasio akseptor KB mandiri	80 %
Terfasilitasinya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan di P2TP2A	100 %
Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	90 %
Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak	Persentase anak yang teryani kebutuhan dasar	65%
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga	30,50%
	Persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi	46,75 %
	Keterlibatan perempuan dalam parlemen	20 %

Dipindai dengan CamScanner

Berikut kami sampaikan rencana program dan anggaran dalam mendukung pencapaian target kinerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2020

Tabel 1.4
Program yang Mendukung Perjanjian Kinerja beserta Anggaran

No	Program	Anggaran
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1.062.689.700
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 65.702.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 146.133.700
4	Program Peningkatan Perlindungan Sosial, Pemberdayaan sosial dan Rehabilitasi Sosial	Rp 2.758.834.700
5	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp 2.536.171.000
6	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp 452.718.000
7	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp 573.707.000

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.1 CAPAIAN KINERJA

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I Laporan ini, bahwa setiap kegiatan dan hasil – hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara/ instansi pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Sebagai wujud pertanggung jawaban, maka setiap kegiatan unit satuan kerja harus dapat diukur keberhasilannya. Tolak ukur kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap satuan unit kerja. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja pada tahun 2019, telah ditetapkan target pencapaian kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja pada bab sebelumnya. Berikut kami sajikan data pencapaian target kinerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2020 :

1. Capaian Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Untuk Capaian Target dan Realisasi Kinerja tahun 2020 dapat dilihat dari table yang sudah kami susun sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
Terfasilitasinya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarpras yang disediakan dan dipelihara	100 %	100 %	100 %
Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi	Persentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase aparatur yang dibina	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian Nilai LAKIP	B	BB	100 %
	Capaian Penyerapan Anggaran	90%	83,04%	92,27%
Meningkatnya penanganan pemberdayaan PMKS	Persentase PMKS yang diberdayakan	7,10%	7,10 %	100 %
Meningkatnya jumlah SDM Kesos yang tersertifikasi	Persentase SDM Kesos yang tersertifikasi	14,67%	43,9 %	299,2 %

Dipindai dengan CamScanner

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	2,08%	29,1 %	1.039,2 %
Meningkatnya penanganan PMKS yang direhabilitasi	Persentase PMKS yang direhabilitasi	6,54 %	17,1 %	261,4 %
Meningkatnya LKS yang terakreditasi	Persentase LKS yang terakreditasi	44,00%	60 %	136,3 %
Meningkatnya rasio akseptor KB	Rasio akseptor	78,80 %	79,89 %	101,3 %
Meningkatnya keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persentase tingkat keberlangsungan kontrasepsi	27 %	26,48 %	98,07 %
Meningkatnya usia kawin pertama	Rata-rata usia kawin pertama	21,5 tahun	21,5 tahun	100%
Meningkatnya kemandirian akseptor KB	Rasio akseptor KB mandiri	80 %	80 %	100 %
Terfasilitasinya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan di P2TP2A	100 %	100 %	100%
Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	90 %	85 %	94 %
Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak	Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	65 %	50 %	76,92 %
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga	30,50 %	20 %	65,57 %
	Persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi	46,75%	40 %	85,5 %
	Keterlibatan perempuan dalam parlemen	20 %	20 %	100 %

Dipindai dengan CamScanner

2. Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja 2018 Dan 2019

Sasaran 2.1.
Terfasilitasinya Penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
Persentase Sarana Prasarana yang disediakan dan dipelihara	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk indikator kinerja pertama yakni persentase sarpras yang disediakan dan dipelihara telah tercapai realisasi kinerja 100 %. Indikator ini didukung oleh kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Sarana dan prasarana yang disediakan selama tahun 2020 adalah 2 buah Lemari Kayu 1 buah rak kayu,1 paket alat kantor lainnya (hand wash portable), 5 unit Personal Komputer, 4 unit Laptop dan 2 unit printer. Sarana tempat yang disediakan sebanyak 5 Unit Sewa Tempat untuk fasilitasi Gudang Arsip, Gedung Sekretariat P2TP2A dan LK3, Gedung Sekretariat Bersama RBM, PSM TRC, Kantor Sekretariat UPPKH Kota Cimahi dan Rumah Singgah Anak Jalanan. Jumlah Sarana Prasarana Kendaran yang dipelihara sebanyak 6 Unit Kendaraan Roda 4 dan 9 unit Kendaraan Roda 2 . Realisasi kinerja untuk indikator kinerja persentase sarpras yang disediakan dan dipelihara mencapai 100 %. Indikator ini dapat tercapai 100 % karena merupakan kegiatan rutin untuk memfasilitasi kebutuhan organisasi serta tidak ada kendala yang dihadapi .

Sasaran 2.2.
Terfasilitasinya Koordinasi dan Konsultasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		

Dipindai dengan CamScanner

Persentase Koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	78,50 %	78,5 %

Indikator kinerja yang kedua adalah terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi. Dari total 229 Surat Undangan dan Koordinasi, Konsultasi dan Keperulan dinas lainnya selama tahun 2020, DINSOSP2KBP3A telah memfasilitasi kehadiran ASN maupun Non ASN sesuai undangan dimaksud sehingga pencapaian kinerja pada indikator ini juga mencapai 100 %.

Sasaran 2.3.
Meningkatnya Kapasitas Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
Persentase Aparatur yang dibina	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator kinerja untuk sasaran strategis berikutnya adalah persentase aparatur yang dibina yang juga mencapai realisasi kinerja sebesar 100 %. Yakni dari target 41 ASN dan 61 Non ASN yang dibina, dicapai target pembinaan 100 %.

Sasaran 2.4.
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
Capaian Nilai LAKIP	B	CC	87,5 %	B	BB	100 %	B	NA	NA
Capaian Penyerapan anggaran	85 %	87,35%	102,76%	87,50%	88,71%	101,38%	90 %	83,04 %	92,26 %

Sasaran strategis yang keempat adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja Capaian Nilai LAKIP, Dari target kinerja nilai B, pada tahun 2020 telah diperoleh hasil evaluasi LAKIP DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2019 yakni senilai BB, sehingga nilai capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 98,5%. Pencapaian nilai LAKIP yang diperoleh ditahun 2019 mengalami

Dipindai dengan CamScanner

kenaikan dikarenakan adanya beberapa perbaikan yang dilakukan oleh DINSOSP2KBP3A dalam penyajian laporannya dan tetap melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait supaya mencapai hasil yang maksimal.

Sasaran 2.5.
Meningkatnya Penanganan Pemberdayaan PMKS

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
Persentase Penanganan Pemberdayaan PMKS	6,49 %	5,6 %	86, 29 %	66,79 %	67,42 %	992,93%	7,10%	7,10 %	100 %

Indikator kinerja keenam adalah persentase PMKS yang diberdayakan. Dari target kinerja sebesar 7,10 % didapatkan realisasi kinerja sebesar 7,10 % sehingga capaian kinerjanya 100 %, capaian ini didukung oleh penanganan pemberdayaan PMKS yang didanai oleh APBN melalui program PKH dan BPNT.

Sasaran 2.7.
Meningkatnya Jumlah SDM Kesos Yang tersertifikasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
Persentase SDM Kesos yang tersertifikasi	8%	13,08%	163 %	11,33 %	90, 47 %	798, 50 %	14,67 %	43,9 %	299,2 %

Indikator kinerja yang harus dievaluasi berikutnya adalah persentase SDM Kesos yang tersertifikasi. Dari target 14,67 % SDM Kesos yang dapat disertifikasi pada tahun 2020 sebanyak 43,9 %, capaian kinerjanya menjadi 299,2 %. Capaia kierja melampaui target Karena SDM K PKH sudah tersertifikasi seluruhnya, serta danya penambahan dari SDM Tagana dan Pekerja Sosial sehingga realisasi melampaui rencana.

Dipindai dengan CamScanner

Sasaran 2.8.
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	1,20 %	23,59%	1965,83%	1,64 %	37, 93 %	2312, 80 %	2,08 %	29,1 %	1.039,2%

Indikator kinerja kedelapan adalah persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Pada target kinerja ini, DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi mendapatkan tambahan pencapaian kinerja dari program PKH khusus disabiltas dan lansia yang baru diluncurkan pada tahun 2018. Tambahan ini menyebabkan angka realisasi kinerja naik drastis. 2,08 % dengan capaian sebesar 29,1 % Akibatnya capaian kinerja pada indilkator ini mencapai 1.039,2 % yang harus ditindaklanjuti dengan revisi target kinerja program pada RPJMD Perubahan Kota Cimahi.

Sasaran 2.9.
Meningkatnya Penanganan PMKS yang Direhabilitasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
Persentase PMKS yang direhabilitasi	6,29 %	31,94%	507,79%	6,42 %	57,69 %	898,60 %%	6,54 %	17,1 %	261,4 %

Indikator kinerja kesembilan adalah persentase PMKS yang direhabilitasi. Indikator kinerja ini memiliki target sebesar 6,54 % . Realisasi kinerja pada indikator kesembilan ini juga mendapat tambahan kinerja yang bersumber Non APBD yakni BAZNAS, swasta, perorangan dan organisasi kemasyarakatan yang mencapai angka realisasi sebesar 17,1 %. Capaian kinerja indikator kesembilan ini pun naik drastis menjadi 261,4 %. Hal ini menunjukan bahwa DINSOSP2KBP3A telah mampu membuka akses dengan beberapa lembaga melalui berbagai pendekatan dalam rangka penanganan PMKS yang

Dipindai dengan CamScanner

direhabilitasi, sehingga ke depan akan lebih ditingkatkan lagi koordinasi kelembagaan dengan berbagai fihak.

Sasaran 2.10.
Meningkatnya LKS Yang Terakreditasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
Persentase LKS yang Terakreditasi	28,00%	19,23%	68,68%	36 %	19,23%	53,41 %	44,00 %	60 %	136,36%

Indikator kinerja berikutnya adalah persentase LKS yang terakreditasi. Dari jumlah 21 LKS, pada tahun 2020 hanya 20 LKS yang mengikuti akreditasi dan yang lolos akreditasi adalah sebanyak 12 LKS. Realisasi mencapai 60% dari target 44 % sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 136,36 %. Hal ini terjadi karena adanya pembinaan dan pendampingan dari DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi yang secara inten melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Lembaga.

Sasaran 2.11.
Menigkatnya Rasio Akseptor KB

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
Rasio Akseptor	80 %	82,44 %	103, 05 %	78,70%	78,89%	100,11%	78,80 %	79,89 %	101,3 %

Indikator kinerja kesebelas adalah Rasio Akseptor. Dari target 78,70 % dicapai realisasi sebesar 79,80 % sehingga tingkat capaian kinerjanya mencapai 101,3 %. Hal ini menunjukan bahwa kinerja lini lapangan cukup maksimal dengan berbagai upaya yang dilakukan terhadap pasangan usia subur, melalui KIE dan kegiatan lain yang menunjang. Sinergitas serta koordinasi dengan berbagai instansi dilaksanakan dengan baik, misalnya dengan BKKBN Jawa Barat, Kodim, fasilitas kesehatan serta praktek bidan mandiri.

Dipindai dengan CamScanner

Sasaran 2.12.
Meningkatnya Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2017			Tahun 2019			Tahun 2019		
Persentase Tingkat Keberlangsungan Kontrasepsi	27 %	26,60 %	98,52 %	27%	26,60%	98,52%	27%	26,48 %	98,07 %

Indikator kinerja berikutnya yang dievaluasi adalah persentase tingkat keberlangsungan kontrasepsi yang memiliki target sebesar 27 % pada tahun 2020 dengan hasil realisasi sebesar 26,48 %. Tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai 98,07 %. Indikator kinerja ini tidak mencapai 100 % sesuai target dikarenakan kondisi di tahun 2020 negara kita dilanda Covid 19, hal ini berakibat pasaangan usia subur cenderung untuk enggan mendatangi fasilitas kesehatan karea takut terpapar covid. Dari sisi Untuk realisasi tahun 2019 dari target sebesar 27 % tercapai sebesar 26,60% sehingga capaian kinerjanya sebesar 98,52% angka ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2018 hal ini menunjukan bahwa tingkat keberlangsungan kontrasepsi di Kota Cimahi dipengaruhi oleh adanya keinginan dari pengguna KB untuk beralih cara pada alat kontrasepsi yang lain sehingga tidak mempengaruhi angka PUS bukan peserta KB.

Sasaran 2.13.
Meningkatnya Usia Kawin Pertama

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
Rata – rata usia kawin pertama	21,5	21,5	100 %	21,5 Tahun	21,5 Tahun	100 %	21,5 Tahun	21,5 Tahun	100 %

Indikator kinerja ketigabelas adalah rata-rata usia kawin pertama yang memiliki target kinerja 21,5 tahun. Hasil dari pengolahan data SIMKAH didapat kan angka 22 tahun dengan margin error setengah tahun sehingga ditetapkan capaian kinerja angka Usia Kawin Pertama juga 100 % yakni 21,5 tahun. Capaian untuk tahun 20 sama dengan capaian kinerja di tahun 2019 yaitu 100%. Hal ini disebabkan bahwa rata rat usia kawin pertama di Kota Cimahi

Dipindai dengan CamScanner

masih dikisaran usia 21 – 22 tahun, artinya edukasi yang diberikan pada masyarakat melalui kegiatan KIE berhasil dengan baik sehungga masyarakat faham akan pentingnya usia kawin pertama.

Sasaran 2.14.
Meningkatnya Kemandirian Akseptor KB

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
Rasio Akseptor KB Mandiri	80 %	82,44 %	103,05 %	80 %	79,92 %	99,9 %	80%	80 %	100 %

Indikator kinerja berikutnya yang dievaluasi adalah rasio akseptor KB mandiri yang mencapai realisasi sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 80 % sehingga capaian kinerjanya menjadi 100 %. Pada tahun 2020 pelayanan pemasangan kontrasepsi selalu dilaksankaan dan tanpa dipungut biaya sehingga berdampak kepada masyarakat secara luas untuk memilih pelayanan secara gratis dari Pemerintah Kota Cimahi dibandingkan harus mandiri sehingga ada biaya yang harus dikeluarkan.

Sasaran 2.15.
Terfasilitasinya Penanganan Kasus Keserasan Terhadap Perempuan dan Anak

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
Cakupan Perempuan dan Anak Korban kekerasan yang mendapat pelayanan di P2TP2A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Indikator kinerja kelimabelas pada DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi adalah cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan di

Dipindai dengan CamScanner

P2TP2A. Selama tahun 2020, terdapat 17 pengaduan kasus kekerasan meliputi 9 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 8 kasus kekerasan terhadap anak. Ke-17 kasus tersebut telah mendapatkan penanganan di P2TP2A sehingga capaian kinerjanya mencapai 100 %. Hal ini membuktikan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam penanganan kasus antara P2TP2A dan Bidang yang menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan memberikan pedampingan baik itu pendampingan psycologi, psycologi sosial, pendampingan hukum maupun pendampingan medis.

Sasaran 2.16.
Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	70 %	79 %	112,86 %	80 %	96, 43 %	120,54 %	90 %	85%	94 %

Indikator kinerja berikutnya yang dievaluasi adalah persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG yang mencapai 94 % dari target kinerja 100 % yang telah ditetapkan sebelumnya, secara umum sosialisasi kepada semua perangkat daerah sudah dilaksanakan, hanya dalam implementasinya perlu pengawasan dan koordinasi dengan TAPD sehigga PPRG dapat diterapkan pada semua SKPD.

Sasaran 2.17.
Meningkatnya Penuhan Hak – Hak Anak

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
Persentase Anak yang terlayani kebutuhan dasar	60 %	83,63 %	139,38%	62,50%	87,94 %	140,70 %	65 %	86,54 %	133,1 %

Indikator kinerja ketujuhbelas yang dievaluasi adalah persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar. Tahun 2020 target sebesar 65 % Realisasi sebesar

Dipindai dengan CamScanner

86,54 % maka capaian kinerjanya sebesar 133,1 % capaian kinerja ini merupakan rata rata dari nilai capaian yang diperoleh dari APM, Anak Usia Sekolah dan Kepemilikan akta kelahiran dan pemenuhan imunisasi dasar lengkap , hal ini menunjukan bahwa kinerja dari masing masing SKPD pengampu sudah cukup baik , adanya komitmen dari pimpinan dalam pemenuhan hak hak dasar anak, serta besarnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan tersebut sehingga capaian bisa melebihi target kinerja.

Sasaran 2.18.
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
Sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga	29,50%	29,82%		29,75%	31,11%	104,57%	30,50 %	NA	NA
Persentase perempuan sebagai tenaga manager, professional, administrasi, teknisi	45 %	49,32%		46,30%	49,49%	106,89%	46, 75 %	NA	NA
Keterlibatan perempuan dalam parlemen	20 %	26 %	130 %	20%	29,87%	149 %	20%	20 %	100 %

Indikator kinerja sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga dan persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi dan teknisi realisasi target sudah terpenuhi bahkan melebihi target yang ditetapkan artinya bahwa peran serta perempuan dalam hal tersebut sangatlah tinggi karena tingkat keberdayaan ekonomi perempuan diKota Cimahi sudah sangat tinggi pula dan melebihi capaian Provinsi dan Nasional, Capian tersebut menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Cimahi member ruang yang cukup besar terhadap partisipasi perempuan dalam pembangunan di segala bidang sedangkan untuk indikator keterlibatan perempuan dalam parlemen tingkat capaian kinerjanya mencapai 100% hal ini menunjukan semakin banyaknya kepercayaan publik terhadap keberdayaan politik perempuan secara keseluruhan. Pada Tahun 2019 dan 2020 jumlah anggota DPRD Wanita sebanyak 12 orang .

Dipindai dengan CamScanner

3. Realisasi Tahun 2019 Dengan Target RPJMD

Indikator	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2019
Persentase sarpras yang disediakan dan dipelihara	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase aparatur yang dibina	100 %	100 %	100 %	100 %
Capaian Nilai LAKIP	B	B	BB	100 %
Capaian Penyerapan Anggaran	90 %	87,50 %	88,71% %	101,38 %
Persentase PMKS yang diberdayakan	7,10 %	6,79%	67,42 %	992,93%
Persentase SDM Kesos yang tersertifikasi	14,67	11,33%	90,47 %	798,50%
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	2,08 %	1,64 %	37,93 %	2312,80%
Persentase PMKS yang direhabilitasi	6,54 %	6,42 %	57,69%	898,60%
Persentase LKS yang terakreditasi	44,00 %	36 %	19,23 %	53,41%
Rasio akseptor	80 %	78,70 %	78,89 %	100,11%
Persentase tingkat keberlangsungan kontrasepsi	27 %	27 %	26,60%	98,52%
Rata-rata usia kawin pertama	21,5 tahun	21,5 tahun	21,5 tahun	100%
Rasio akseptor KB mandiri	80 %	80 %	79,92%	99,9%

Dipindai dengan CamScanner

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan di P2TP2A	100 %	100 %	100 %	100%
Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	90 %	80 %	100 %	125 %
Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	65 %	62,50 %	87,94%	140,70%
Sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga	30,50 %	29,75 %	31,11%	104,57%
Persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi	46 ,75%	46 ,30%	49,49%	106,89%
Keterlibatan perempuan dalam parlemen	20 %	20 %	29,87%	149,4%%

4. Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan SPM

Indikator	Target SPM	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2019
Persentase sarpras yang disediakan dan dipelihara	-	100 %	100 %	100 %
Persentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	-	100 %	100 %	100 %
Persentase aparatur yang dibina	-	100 %	100 %	100 %
Capaian Nilai LAKIP	-	B	BB	100 %
Capaian Penyerapan Anggaran	-	87,50 %	88,71% %	101,38 %
Persentase PMKS yang diberdayakan	-	6,79%	67,42 %	992,93%

Dipindai dengan CamScanner

Persentase SDM Kesos yang tersertifikasi	-	11,33%	90,47 %	798,50%
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	-	1,64 %	37,93 %	2312,80%
Persentase PMKS yang direhabilitasi	-	6,42 %	57,69%	898,60%
Persentase LKS yang terakreditasi	-	36 %	19,23 %	53,41%
Rasio akseptor	-	78,70 %	78,89 %	100,11%
Persentase tingkat keberlangsungan kontrasepsi	-	27 %	26,60%	98,52%
Rata-rata usia kawin pertama	-	21,5 tahun	21,5 tahun	100%
Rasio akseptor KB mandiri	-	80 %	79,92%	99,9%
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan di P2TP2A	-	100 %	100 %	100%
Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	-	80 %	100 %	120,54 %
Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	-	62,50 %	87,94%	140,70%
Sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga	-	29,75 %	31,11%	104,57%
Persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi	-	46 ,30%	49,49%	106,89%
Keterlibatan perempuan dalam parlemen	-	20 %	29,87%	149,4 %

Dipindai dengan CamScanner

Adanya perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/Huk/2008 Tahun 2008 dan sejak berlakunya Undang ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dengan adanya kebijakan ini maka SPM Bidang sosial mengalami perubahan yang cukup mendasari SPM sebelumnya sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 maka secara otomatis terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap indikator SPM yag menjadi garapan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Pada Tahun 2018 Permensos tersebut baru pada tahapan sosialisasi dan pada tahun 2019 baru dilaksanakan penganggaran untuk penerapan SPM ditahun 2020 sesuai dengan indikator yang baru sehingga untuk realisasi penerapan SPM tahun 2019 belum bisa dilaporkan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Keberhasilan program dan kegiatan dalam rangka mencapai indikator kinerja utama akan sangat dipengaruhi oleh daya dukung sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi, baik itu sumber daya manusia, sumber dan anggaran, sumber daya sarana dan prasarana, sumber daya kemitraan.

Sumber Daya yang dimiliki oleh DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi meliputi :

- **Sumber Daya Manusia**

  Sumber Daya Manusia yang mendukung keberlangsungan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan saat ini terdiri dari :

A S N	: 41 Orang
THL APBD	: 40 Orang
THL Propinsi	: 16 Orang
THL Pusat/PKH	: 52 Orang

- **Sumber Daya Anggaran dan pembiayaan**

  Sumber dana yang dimiliki selain dari APBD juga dana dana yang diperoleh dari DAK, Bantuan Gubernur (Tentatif) juga dana dari BAZNAS Kota Cimahi ataupun sumbangan perorangan (untuk kegiatan sosial)

- **Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

  Sarana yang dimiliki meliputi : Gedung dan Kendaraan Operasional

  Gedung terdiri dari 9 Bangunan terdiri dari :

  a. Gedung kantor DINSOSP2TP2A

Dipindai dengan CamScanner

b. Gedung Balai Penyuluh KB

c. Gudang Alat Kontrasepsi

d. Gedung Sekretariat P2TP2A

e. Rumah Singgah

f. Gudang Arsip

g. Sekretariat PKH

h. Sekretariat Bersama LK3

i. Sekretariat Tagana

Untuk beberapa sarana yang dimiliki seperti Gedung Sekretariat P2TP2A, Rumah Singgah, Gudang Arsip, Sekretariat PKH, Sekretariat Bersama LK3 dan Sekretariat Tagana statusnya masih sewa kepada pihak lain ini menunjukan bahwa DINSOSP2KBP3A akan senantiasa berupaya maksimal menggunakan sumber daya yang ada untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

- **Sarana transfortasi (Kendaraan Operasional)**

Sarana kendaraan operasional yang dimiliki oleh DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi :

- Kendaraan Akseptor KB satu unit
- Kendaraan Mobil Perlindungan (MOLIN) satu unit
- Kendaraan /Mobil Penerangan (Mupen KB) satu unit
- Kendaraan Mobil BOX Untuk Distribusi Alkon satu unit
- Kendaraan Roda dua sebanyak 9 Unit

Dipindai dengan CamScanner

6. Cross Cutting Program Dengan SKPD Terkait Dan Instansi Lainnya

1) CROSS CUTTING PROGRAM KELUARGA BERENCANA

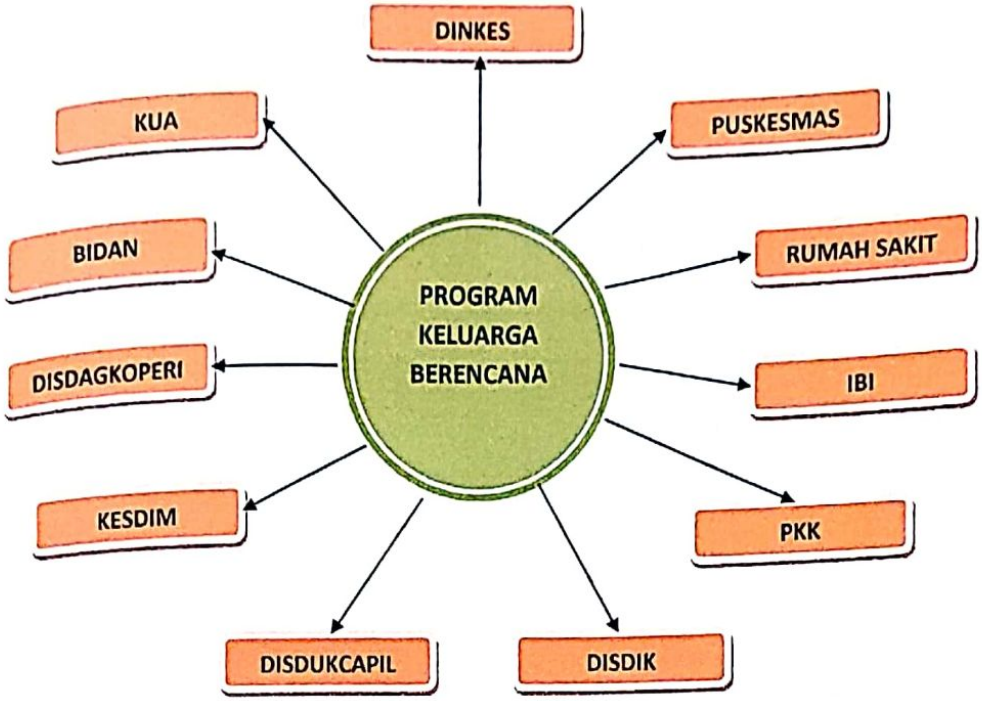

1) CROSS CUTTING PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN REHABILITASI SOSIAL

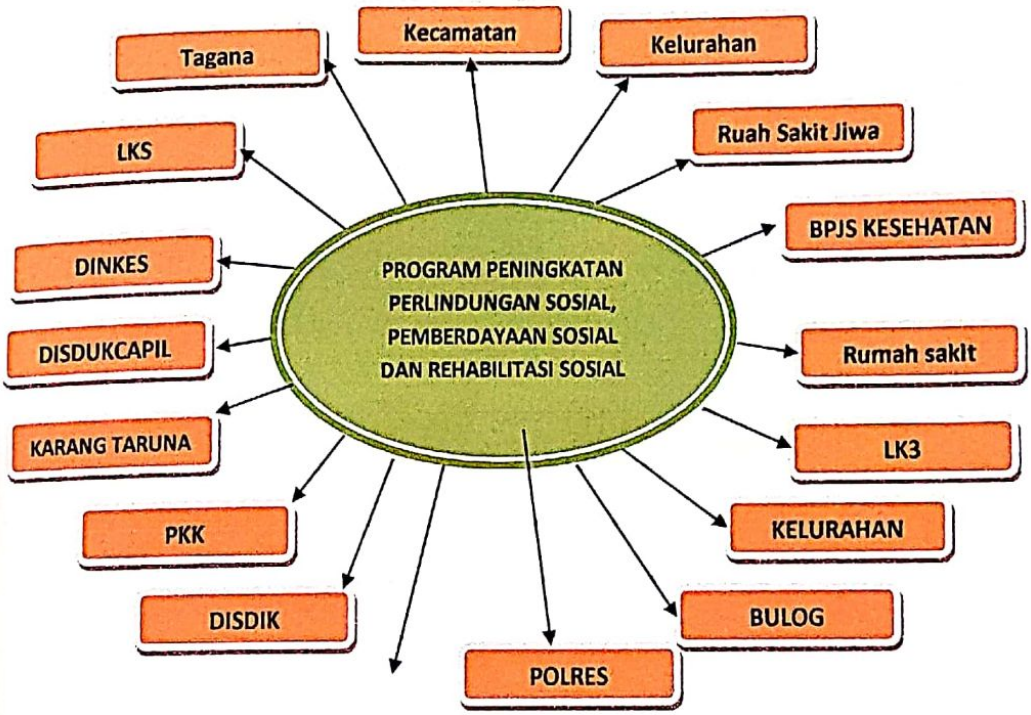

Dipindai dengan CamScanner

2) CROSS CUTTING PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

3) CROSS CUTTING PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Dipindai dengan CamScanner

4) CROSS CUTTING PROGRAM PEINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARTUR

5) CROSS CUTTING PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Dipindai dengan CamScanner

6) CROSS CUTTING PENINGKATAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

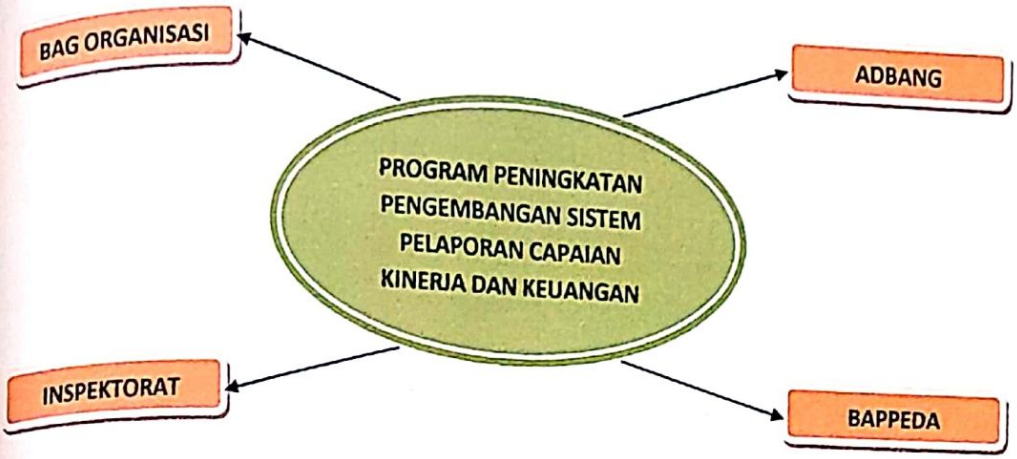

7. **Prestasi, Penghargaan dan Inovasi DINSOSP2KBP3A Tahun 2020**

- Juara I Duta Genre Puteri Tk. Provinsi jawa Barat
- Juara II Duta Genre Puteri Tk. Nasional
- Juara I pelaksana IVA Test Lomba 10 Program Pokok PKK Tk. Provinsi Jawa Barat (Kel. Cigugur Tengah)
- Juara I terbaik Pola asuh Anak dan Remaja (PAAR) Tk. Provinsi Jawa Barat (Kel. Cigugur Tengah)
- Juara III Pelaksana terbaik UP2K Lomba 10 Program PKK Tk. Provinsi Jawa Barat. (kel. Cigugur Tengah)
- Terbaik ke III Kelompok BKR Tk. Provinsi Jawa Barat (Kel. Cibabat)
- Juara Video Terkreatif Tk.Provinsi Jawa Barat untuk PIK Remaja (Kel. Citeureup)
- Harapan III Pelaksana terbaik Tertib administrasi Lomba 10 Program PKK Tk. Provinsi jawa Barat. (Kel. Cigugur Tengah)
- Juara ke II Apresiasi kampung KB Tingkat Provinsi.
- Inovasi yang digunakan pada saat pandemic Covid adalah SIDADU merupakan Sistem data terpadu yang dipakai untuk meminimalisir kesalahan data KPM yang akan menerima bansos sehingga bansos akan tepat sasaran. Juga adanya Kolaborasi dalam hal pendistribusian bansos denga melibatkan beberapa unsure di masyarakat misalnya PKK, Karang

Dipindai dengan CamScanner

taruaa, LPM, RT, RW juga dengan adanya keterlibatan semua SOPD yang mempunyai wilayah binaan masing masing.

8. Prestasi, Penghargaan Dan Inovasi Kota Cimahi Tahun 2019

- Juara ke III Kesrak PKK KKBPK Kes Tingkat Provinsi Jawa Barat
- PIK R duta Genre Juara Harapan I Tingkat Provinsi
- Juara I 10 Program PKK Tingkat provinsi
- Posyandu Award Tingkat Provinsi Jawa Barat
- Kota Layak Anak Tingkat Pratama Tingkat Nasional
- DAFA Award 2019, Penganugrahan DAFA award 2019 katagori Kota Terbaik Tingkat Nasional.
- Juara I Lomba PAAR di RW 01 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Tingkat Provinsi
- Pakarti Madya Tingkat Nasional Pelaksana Terbaik PHBS Tingkat Nasional Kategori Kota Tahun 2019 di RW 12 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara
- Pakarti Madya II Tingkat Nasional Pelaksana Terbaik IVA Test Tingkat Nasional Kategori Kota Tahun 2019 di RW 04 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Cimahi Tengah

9. Prestasi, Penghargaan dan Inovasi Kota Cimahi Tahun 2018

- Juara I Tingkat Provinsi Pasangan Akseptor Lestari 15 Tahun
- Juara Harapan I Duta Remaja Jalur Pendidikan
- Juara II Tingkat Provinsi Duta Remaja Jalur Masyarakat Putra
- Juara Harapan I Tingkat Provinsi Duta Remaja Jalur Masyarakat Putri
- Juara III Tingkat Provinsi Kelompok Paguyuban KB Pria
- Juara II Tingkat Provinsi Kelompok PIK Jalur Pendidikan (SMKN 1 Cimahi)
- Juara I Tingkat Provinsi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP Pos KB)
- Juara I Tingkat Provinsi Lomba IVA Test di RW 04 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Cimahi Tengah
- Juara III Tingkat Provinsi Lomba Kesrak PKK-KKBPK-KES RW 12 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara
- Juara I Tingkat Provinsi Lomba PHBS di RW 12 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

PENUTUP

4.1 Penutup

Pada bagian penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2020 ini, dapat Kami simpulkan bahwa DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi secara umum melalui 4 (empat) Tujuan, 4 Sasaran Strategis, 5 Indikator Kinerja Utama dan 21 (dua puluh dua) Indikator kinerja program.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja indikator sasaran dan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berkaitan dengan hal itu, maka berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 20 indikator program, dapat diinformasikan ketercapaian kinerja indikator sasaran sebagai berikut : 9 indikator kinerja program berhasil mencapai target kinerja 100 %, indikator kinerja program berhasil melampaui target yang ditetapkan yakni sebanyak 5 indikator yaitu capaian persentase SDM yang tersertifikasi, persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, persentase PMKS yang direhabilitasi, Persentase LKS yang terakreditasi, Rasio Akseptor, sedangkan 6 indikator program belum mencapai target kinerja 100% yakni Indikator Kinerja Capaian penyerapan anggaran yanghanya terserap sekitar 92, 27 %, Indikator Kinerja Meningkatnya keberlangsungan pemakaian kontrasepsi hanya mencapai 98,07 % , Indikator persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG 94 %, indikator persentase anak yang terlayani kebutuhan dasarnya sebesar 86,54 % dan masih terdapat dua indikator yang belum terlaporkan yaitu indikator sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga dan indikator persentase perempuan sebagai tenaga manager, professional, administrasi , teknisi karena masih menunggu hasil koordinasi dengan instansi yang lain. Dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.595.956.100,- direalisasikan sebesar 83,04 % yakni sebesar Rp.6.307.828.430 ,- sehingga dapat dihitung efisiensi anggaran DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi selama kurun waktu 2020 sebesar 16,96 %. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena terkendala covid 19.

Permasalahan yang dihadapai oleh DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi cukup banyak, selain keterbatasan anggaran dan dana juga keterbatasan Sumber Daya. Secara Organisasi urusan sosial yang menjadi urusan wajib pemerintahan masih dikelola oleh satu bidang yaitu bidang sosial, sedangkan idealnya urusan sosial

Dipindai dengan CamScanner

semestinya harus dikelola oleh dalah satu organisasi perangkat daerah yang mandiri atau menjadi dinas (Dinas Sosial) sehingga secara organisasi akan maksimal dalam penganggaran dengan dukungan sumber daya yang maksimal pula. Semoga ke depan akan menjadi lebih baik dalam rangka memberikan kesejahteraan masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner